

Analisis Kinerja Laporan Keuangan Kabupaten Bogor

Retyaningsih¹, Ade Irawan², Didik Riyanto³, Siti Nuridah⁴

^{1,2,3,4}FEB, Universitas Pertiwi

e-mail: siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bogor pada periode 2018-2022 yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan Kabupaten Bogor dilakukan selama periode 2018-2022. Pengukuran dilakukan dalam beberapa periode dikarenakan untuk dapat mengukur pertumbuhan kinerja keuangan Kabupaten Bogor selama 5 tahun terakhir. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Bogor dengan melakukannya perhitungan rasio-rasio keuangan yang angkanya bersumber dari laporan keuangan. Laporan keuangan dapat diunduh melalui *website* resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Media Link Informasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Alamat dari *website* tersebut yaitu <https://ppid.bogorkab.go.id/index.php>. Hasil Penelitian ini adalah 1. Rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 31,73% dan termasuk dalam kategori cukup, 2. Rata-rata nilai rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 49,23% dan termasuk dalam kategori tinggi, 3. Rata-rata nilai rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 12,56% dan termasuk dalam kategori sangat efisien, 4. Rata-rata nilai rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 100,95% dan termasuk dalam kategori sangat efektif, 5. Rata-rata nilai rasio belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 78,44% dan termasuk dalam kategori serasi, 6. Rata-rata nilai rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 16,09% dan termasuk dalam kategori tidak serasi, dan 7. Rata-rata nilai rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar -11,90% dan termasuk dalam kategori negatif.

Kata kunci: *Rasio Keuangan , Kabupaten Bogor*

Abstract

The aim of this research is to determine the financial performance of Bogor Regency in the 2018-2022 period in terms of the degree of decentralization ratio, dependency ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio, harmony ratio and growth ratio. . Bogor Regency's financial performance was measured during the 2018-2022 period. The measurements were carried out over several periods to be able to measure the growth of Bogor Regency's financial performance over the last 5 years. This research analyzes the financial performance of Bogor Regency by calculating financial ratios whose figures come from financial reports. Financial reports can be downloaded via the official website of the Information and Documentation Management Officer (PPID), Bogor Regency Government Information Media Link. The address of the website is <https://ppid.bogorkab.go.id/index.php>. The results of this research are 1. The average value of the degree of decentralization ratio for the Bogor Regency Government, shows that in 2018-2022 it is 31.73% and is included in the sufficient category, 2. The average value of the dependency ratio for the Bogor Regency Government, shows that in in 2018-2022 it was 49.23% and included in the high category, 3. The average

value of the efficiency ratio for the Bogor Regency Government shows that in 2018-2022 it was 12.56% and included in the very efficient category, 4. Average The average effectiveness ratio value of the Bogor Regency Government shows that in 2018-2022 it is 100.95% and is included in the very effective category, 5. The average value of the operational expenditure ratio for the Bogor Regency Government shows that in 2018-2022 it is 78.44% and is included in the harmonious category, 6. The average value of the Bogor Regency Government's capital expenditure ratio shows that in 2018-2022 it is 16.09% and is included in the mismatched category, and 7. The average value of the Government's growth ratio Bogor Regency, shows that in 2018-2022 it was -11.90% and was included in the negative category.

Keywords: *Financial Ratios, Bogor Regency*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia, dengan diadopsinya asas desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah (Nurmiyati Niken et al., 2020).

Salah satu tujuan diadopsinya kebijakan desentralisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah (Okuputra & Nasikh, 2022). Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara pembangunan-pembangunan daerah yang direncanakan oleh pemerintah daerah dan anggaran daerah, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan menunjukkan kinerja keuangan yang baik agar tidak terjadi kerugian karena ketidakmampuan dalam pengelolaan keuangan.

Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba (Loho et al., 2021). Bagi pemerintah daerah, pendapatan berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan sah lain-lain (Priyanto & Utomo, 2018). Kemudian pengeluaran daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Pemerintah diharuskan memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan terutama terkait anggaran belanja modal agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini karena kinerja keuangan pemerintah tergambar dari kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Sanusi, 2011).

Fenomena yang terjadi pada keuangan kabupaten Bogor bahwa pada tahun 2021 terjadi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp794 Miliar. Defisit terjadi lantaran belanja daerah yang ditargetkan dalam RAPBD lebih besar dari target pendapatan daerah. Pendapatan ditarget Rp7,76 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp2,98 triliun, target pendapatan transfer Rp4,74 triliun dan target lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp30,23 miliar. Sementara target belanja daerah sebesar Rp8,93 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp5,46 triliun, belanja modal Rp1,94 triliun dan belanja tidak terduga Rp99,54 triliun serta belanja transfer daerah Rp1,41 triliun. Sehingga

masih ada defisit Rp1,17 triliun. Sebagian sudah dapat ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah, sehingga sisa defisit yang harus ditutup sebesar Rp794,19 miliar (Ali, 2021).

Kemudian defisit terjadi lagi pada bulan Februari 2023 yaitu Pemkab Bogor mengalami defisit sekitar Rp 400 miliar lantaran angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 tak sesuai dengan prediksi. Saat APBD 2023 kabupaten disahkan pada akhir November 2022, SiLPA diprediksi sekitar Rp 700 miliar. Namun, pada akhir Desember 2022, penyerapan anggaran di Kabupaten Bogor cukup baik. Sehingga, menyisakan SiLPA hanya sekitar Rp 250 miliar. Diketahui, pada akhir tahun 2022, Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menetapkan APBD tahun anggaran 2023 dengan target pendapatan daerah sekitar Rp 8,5 triliun, kemudian belanja daerah ditarget Rp 9,14 triliun. Terdapat defisit anggaran sekitar Rp 642 miliar yang tertutupi oleh pembiayaan neto. Sebelumnya, Kepala Bagian Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan menyebutkan bahwa prediksi SiLPA Rp 700 miliar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah diterbitkan. Dari APBD senilai Rp 8,5 triliun pada tahun 2022, Pemkab Bogor saat itu menargetkan untuk menyerap 93,4 persen. Namun, kenyataannya melampaui target. Kondisi tersebut terpaksa membuat Pemkab Bogor merencanakan perubahan anggaran secara parsial dalam waktu dekat untuk menyelaraskan kembali antara pendapatan dan belanja (Yulianto, 2023).

Defisit anggaran adalah selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah, yang sama dengan jumlah utang baru yang dibutuhkan pemerintah untuk mendanai operasinya. Defisit anggaran tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan (Suhaidi, 2022). Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Husriah, 2019) bahwa defisit anggaran berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini artinya bahwa jika defisit anggaran tinggi akan menurunkan perekonomian negara. Hal ini disebabkan oleh tingginya pembiayaan defisit yang dilakukan melalui utang, sehingga berdampak pada nilai tukar rupiah melemah, terjadi inflasi, investasi menurun, suku bunga meningkat.

Pengukuran kinerja ini merupakan masalah rumit dan sering diperdebatkan, terlebih kinerja pemerintah. Berbeda dengan sektor swasta yang cukup mengandalkan laporan laba rugi dan neraca, entitas pemerintah perlu melihat berbagai laporan yang menjelaskan beragam operasional pemerintah, di samping neraca. Terlebih, ukuran yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah entitas cukup beragam. Terlebih, analisis rasio entitas pemerintah masih sangat variatif dan di antaranya mengadopsi beberapa rasio dari analisis laporan keuangan perusahaan komersial (Karina & Wibowo, 2022).

Analisis laporan keuangan berguna untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan sebuah entitas. Dalam konteks sektor publik, analisis ini dibutuhkan antara lain untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya dan evaluasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan berbagai macam indikator. Aspek likuiditas, otonomi, kinerja operasi, efisiensi dan solvabilitas, sering digunakan dalam melihat kondisi keuangan pemerintah daerah. Adapun Halim dalam (Karina & Wibowo, 2022) menggunakan lima rasio derajat otonomi fiskal, kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi keuangan daerah, dan keserasian, untuk menilai kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Bogor pada periode tahun 2018 hingga 2022. Telah ada penelitian terdahulu yang menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Bogor. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Silvianingsih & Rani,

2022) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2019”. Hasil penelitian bahwa kinerja keuangan pada Kota Bogor sudah baik jika ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, akan tetapi untuk Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah kurang mengoptimalkan pendapatan dari sektor lain sehingga tingkat ketergantungan akan dana transfer masih sangat tinggi dan Rasio Efisiensi kurang efisien karena lebih besarnya belanja daerah daripada pendapatan daerah yang diterima. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh (Alfajar & Masjono, 2020) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020”. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020 dengan menggunakan Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah masuk ke dalam kategori cukup. Rasio ketergantungan memperoleh kategori Tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah memperoleh kategori partisipatif. Rasio efektivitas memperoleh kategori sangat efektif. Rasio efisiensi jika dinilai memperoleh kategori tidak efisien. Rasio keserasian dilihat dari rata-rata belanja keduanya, belanja operasi lebih unggul bila dibandingkan belanja modal. Rasio Pertumbuhan menunjukkan tren yang positif yaitu sebesar 10,21%.

Pengukuran kinerja keuangan Kabupaten Bogor dilakukan selama periode 2018-2022. Pengukuran dilakukan dalam beberapa periode dikarenakan untuk dapat mengukur pertumbuhan kinerja keuangan Kabupaten Bogor selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan pada peninjauan penelitian terdahulu, pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian. Dan sebagai kebaruan penelitian, penelitian ini menambahkan rasio pertumbuhan. Rahmayanti dalam (Awani & Hariani, 2021) mengatakan bahwa rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Apabila rasio pertumbuhan menunjukkan angka positif maka menggambarkan kinerja keuangan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Penelitian mengenai rasio keuangan telah banyak diteliti diantaranya oleh Irma Intan Suryana et al (2023), Rafida Nur Azizah et al (2023).

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan didefinisikan oleh (Andivo & Silvera, 2020) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan” adalah serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya seperti pemda, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerja sama antar sektor publik dan sektor swasta. Menurut Halim dalam jurnal (Novita, 2021) yang berjudul “Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat” bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi yang memerlukan. Hasil informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal. Pernyataan Halim di atas menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah ialah suatu cara metode yang digunakan untuk mencatat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu waktu periode di suatu instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sistem Akuntansi keuangan Daerah

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan. Menurut Halim dan Kusufi dalam jurnal (Timang, 2022) yang berjudul “Evaluasi Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong” bahwa akuntansi adalah suatu sistem. Suatu sistem mengolah data input (masukan) adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir dan output (keluaran) adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi dalam rangka pengambilan keputusan.

Rasio Derajat Desentralisasi

Desentralisasi menurut (Qomariyah, 2018) dalam “Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah” merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Ketergantungan

Menurut (Alfajar & Masjono, 2020) dalam “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018” menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menurut (Indrayani & Khairunnisa, 2019) dalam “Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)” adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah aktivitas dalam sumber daya yang digunakan.

Rasio Efektivitas

Menurut Halim dalam jurnal (Vurry et al., 2018) yang berjudul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng” menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

METODE

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Bogor dengan melakukannya perhitungan rasio-rasio keuangan yang angkanya bersumber dari laporan keuangan. Laporan keuangan dapat diunduh melalui *website* resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Media Link Informasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Alamat dari *website* tersebut yaitu <https://ppid.bogorkab.go.id/index.php>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa pada pertumbuhan rasio derajat desentralisasi di Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Di mana pada tahun 2018-2020 Kabupaten Bogor mendapatkan kategori cukup, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi kategori baik. Dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi sangat kurang. Jika berdasarkan nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bogor berada pada nilai 31,73% dan pada kategori cukup. Hal ini

menunjukkan bahwa kemampuan desentralisasi atau tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan otonomi daerah sudah cukup baik. Dan pemerintah Kabupaten Bogor tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.

2. **Rasio ketergantungan** menunjukkan bahwa pertumbuhan rasio ketergantungan pada tahun 2018-2022 fluktuatif. Di mana pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan. Meskipun jika dilihat dari kategori sama-sama menunjukkan kategori ketergantungan yang tinggi, tetapi nilai rasio ketergantungan di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Bogor mengalami penurunan pendapatan asli daerah yang disebabkan karena Covid-19 sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pajak karena banyak wajib pajak yang mengalami penurunan pendapatan, kemudian penurunan pendapatan pariwisata dan lainnya.
3. **Rasio efisiensi** menunjukkan bahwa pertumbuhan rasio efisiensi Kabupaten Bogor pada tahun 2018-2022 cukup fluktuatif. Di mana pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -0,04%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan 7,56%, dan kembali mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar -7,64%, sebelum akhirnya kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 44,83%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 di mana nilai rasio efisiensi semakin besar justru menunjukkan bahwa daerah tidak cukup efisien dalam mengelola dananya untuk memperoleh pendapatan. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan karena terjadi penurunan pada pendapatan asli daerah yang disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menurunkan tingkat perekonomian masyarakat yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Tetapi secara rata-rata bahwa nilai rasio efisiensi sebesar 12,56% dan dalam kategori sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor mampu mengelola biaya operasional secara efisien untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan maksimal.
4. **Rasio efektifitas** menunjukkan bahwa pertumbuhan rasio efektivitas Kabupaten Bogor cukup fluktuatif. Di mana pada tahun 2018-2019 menunjukkan kategori yang efektif, dan meningkat secara terus menerus dari tahun 2020-2021 menjadi sangat efektif, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi kategori efektif. Tetapi jika berdasarkan pada hasil perhitungan rata-rata menunjukkan bahwa rata-rata nilai rasio efektivitas sebesar 100,95% dengan kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2018-2022 memiliki kinerja anggaran yang sangat efektif.
5. **Rasio Keserasian** menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022, hanya pada tahun 2022 rasio belanja operasi mengalami kenaikan positif sebesar 0,40%. Sisanya mengalami pertumbuhan negatif. Tetapi berdasarkan pada kategori menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021 Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki nilai rasio belanja operasi yang sangat serasi, yang kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi serasi. Penurunan ini disebabkan karena terjadi penurunan pendapatan asli daerah sehingga berkurangnya alokasi pada belanja operasi. Tetapi berdasarkan pada perhitungan rata-rata menunjukkan bahwa nilai rasio belanja operasi sebesar 78,44% dan nilai ini tepat sesuai dengan standar yang diungkapkan oleh (Fathah, 2018) bahwa belanja operasi menghabiskan porsi sebesar 60-90% dari total belanja daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 31,73% dan termasuk dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan desentralisasi atau tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan otonomi daerah sudah cukup baik.
2. Rata-rata nilai rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 49,23% dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor masih memiliki ketergantungan yang

tinggi kepada transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat dan belum bisa sepenuhnya mandiri dalam kemampuan keuangannya.

3. Rata-rata nilai rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 12,56% dan termasuk dalam kategori sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor mampu mengelola biaya operasional secara efisien untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan maksimal.
4. Rata-rata nilai rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 100,95% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kinerja anggaran yang sangat efektif.
5. Rata-rata nilai rasio belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 78,44% dan termasuk dalam kategori serasi. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja operasi sudah optimal dan sudah dilakukan penghematan pada anggaran Operasional. Dan belanja operasi yang tinggi dimaksudkan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.
6. Rata-rata nilai rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar 16,09% dan termasuk dalam kategori tidak serasi. Nilai yang rendah dikarenakan sifat belanja modal yang tidak rutin setiap periode. Kemudian pemerintah dengan pendapatan yang tinggi, lebih rendah dalam pengeluaran belanja modal, hal ini karena telah memiliki aset modal yang mencukupi.
7. Rata-rata nilai rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 sebesar -11,90% dan termasuk dalam kategori negatif. Tetapi jika melihat pada hasil rekapitulasi, penurunan terjadi pada tahun 2020 secara drastis karena Covid-19, dan penurunan terjadi pada tahun 2022 karena adanya bencana gempa bumi di Bogor dan sekitarnya yang menurunkan kinerja sektor kepariwisataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alfajar, A., & Masjono, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018. *Prosiding SMAN PNJ*, 1–13. <http://ereport.ipb.ac.id/id/eprint/1102/1/J3N217418-01-SIGIT-COVER.pdf>
- Ali, R. (2021). Defisit APBD Perubahan Kabupaten Bogor Mencapai Rp794 Miliar. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/uang/defisit-apbd-perubahan-kabupaten-bogor-mencapai-rp794-miliar.html>
- Andivo, F., & Silvera, D. Lady. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. *Pareso Jurnal*2, 2(2).
- Andriani, I. (2020). Analisis Kinerja Belanja Daerah Di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(2), 120–128. <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i2.12041>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Bulo, Y., & Deviyanti, D. R. (2020). Analisis Rasio Keuangan Pada Laporan Realisasi Anggaran Di Pemerintah Daerah Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman ...*, 1, 1–14. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/5029>
- Cahyaning, E., & Putri, F. K. (2022). Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4), 257–263. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.85>
- Dariana, D., & Oktavia, J. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Kasus pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 77–105. <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/132>

- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72–88. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam>
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Fathah, R. N. (2018). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>
- Fazila, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7325>
- Firmansyah, Ismail, I., & Saggaf, S. (2020). Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 1(1). <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa/article/view/79%0Ahttps://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa/article/download/79/69>
- Gohung, G. S., Masinambow, V. A. ., & Siwu, H. F. D. (2022). KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2019-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(8), 97–108.
- Husriah. (2019). Pengaruh Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Economix*, 7, 17–24.
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>
- Intan Suryana, I., Nuridah, S., & Shinta Kusumaningtyas, D. (2023). Penerapan Akuntansi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Dalam Rumah Tangga Pasangan Milenial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9480–9492. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.6026>
- Irawati, I., Salju, S., & Hapid, H. (2019). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt. Telkom Kota Palopo. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 6–12. <https://doi.org/10.35906/jm001.v3i2.302>
- Jayusman, H. (2021). Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Pada Mts Negeri 1 Pangkalan Bun. *Magenta*, 10(1), 43–52.
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Kopong, L. S. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 (Studi Pada Empat Kabupaten Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 7(1).
- Loho, B., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabiitas, Aktivitas dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Tanto Intim Line. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1368–1374.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sekor Publik. In Yogyakarta (Issue 25). http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dan_a_Umum_Genera.docx
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>

- Novita, L. (2021). EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT. 16(2), 99–108.
- Nur Azizah, R., Irawan, A., Shinta Kusumaningtyas, D., & Nuridah, S. (2023). Perbedaan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Tekstil Yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7604–7621. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5736>
- Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 067–100. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.36>
- Nurmiyati Niken, Zuhriyati, E., & Noor, M. (2020). Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah. *Jurnal MODERAT*, 6(2), 376. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3409>
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *Inovasi*, 18(1), 159–166. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>
- Priyanto, R., & Utomo, R. (2018). Upaya Optimalisasi Perpajakan di Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Perpajakan Bagi Decision Maker. *Prosiding Sembadha*, 1(1), 38–45. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/344>
- Purnomo, G. S., & Achmad Komarudin. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7, 1–20.
- Qomariyah, S. N. (2018). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i1.1336>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111.
- SAIFRIZAL, M. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Di Kabupaten Bireuen. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(3), 202–211. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i3.1561>
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Ketiga. Salemba Empat.
- Savitri, K. A. A., Dewantara, M. A., Darmayanti, N. L. P. A., Dewi, K. Y. K., & Sari, N. K. C. P. (2019). Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 59–71. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19939>
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu). *Jurnal Manajemen*, 6(2), 129–138.
- Siinta, A. F. Y., & Darutama, A. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Silvianingsih, R., & Rani, U. (2022). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2019. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 1–12.

- Sinulingga, P. S. B., Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). *Jurnal Manajemen*, 8(1), 89–106. <http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/158>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta.
- Suhaidi, M. (2022). Pengaruh Defisit Anggaran, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2167–2182.
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Suwingnyo, D. (2019). PENGARUH PELATIHAN, KEJELASAN TUJUAN, DUKUNGAN ATASAN TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lebak). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 35–49. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i1.5456>
- Talumewo, K. D. K. S., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(02), 3.
- Tawakkal, U. (2018). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 210–217. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v1i1.387>
- Timang, A. K. (2022). Evaluasi Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi ...)*, 6(1), 8–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/43454>
- Vurry, A. N., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 128–135.
- Wardiningdyah, S. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah. *Artikel*, 33(1), 1–12.
- Wulandari, S. (2018). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio Efisiensi dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. *Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan*, 1–79.
- Yudi Rahman, Fauziannor, & Rizalu Mastaqim. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Kota Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 386–403. <https://doi.org/10.35972/jieb.v8i2.768>
- Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. CV. Noah Aletheia.
- Yulianto, A. (2023). Pemkab Bogor Defisit Rp 400 Miliar akibat Silpa tak Sesuai Prediksi. *Rejabar*. <https://rejabar.republika.co.id/berita/rqnxvs396/pemkab-bogor-defisit-rp-400-miliar-akibat-silpa-tak-sesuai-prediksi>
- Yulitiawati, & Mustika, A. (2020). Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2013-2017. *Jurnal ETAP*, 1(1), 67–79.